

**DINAMIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM
MEMBANGUN RELASI DENGAN ORGANISASI POLITIK
PADA ERA AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DI INDONESIA**

Pardianto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

pardianto@uinsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 7th December 2025

Accepted: 15th January 2026

Published: 1st March 2026

Page: 1-20

Keyword:

*Komunikasi Islam,
Organisasi Politik, AI
(Artificial Intelligence),
Etika Komunikasi*

Corresponding Author

Pardianto

Abstract

This article aims to analyze the dynamics of Islamic communication in building relationships with political organizations in the age of AI. This study employs a qualitative research method using a literature review approach, examining various academic sources such as books, scholarly journals, and related publications.

Research findings indicate that Islamic communication is undergoing a transformation characterized by the digitization of da'wah, the use of algorithms in message dissemination, the role of social media as a space for interaction between religious and political actors, the digitization of political da'wah, and the expansion of religious authorities' reach in the digital age, which strengthens the political participation of Muslims. On the other hand, challenges such as polarization and the echo chamber effect have emerged. Therefore, it is necessary to strengthen the ethics of Islamic communication based on the values of honesty, responsibility, and information verification (tabayyun) in facing the AI era. The development of AI also has significant implications for democratic practices in Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi Islam dalam membangun relasi dengan organisasi politik pada era AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research), dengan mengkaji berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Islam mengalami transformasi yang ditandai dengan digitalisasi dakwah, pemanfaatan algoritma dalam penyebaran pesan, peran media sosial sebagai ruang interaksi antara aktor keagamaan dan politik, digitalisasi dakwah politik, dan otoritas keagamaan di era digital memperluas jangkauan dakwah dan memperkuat partisipasi politik umat Islam. Disisi lain munculnya tantangan polarisasi dan echo chamber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika komunikasi Islam yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan verifikasi informasi (tabayyun) dalam menghadapi era AI. Perkembangan AI juga memiliki implikasi signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

Copyright © 2026 The authors. JMEC is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0. International License

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola komunikasi sosial, keagamaan, dan politik. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika komunikasi Islam menjadi semakin kompleks ketika berinteraksi dengan organisasi politik dalam lanskap digital yang terus berkembang. Komunikasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai medium pembentukan opini publik, mobilisasi sosial, dan penguatan relasi dengan kekuatan politik. Dalam era AI, komunikasi ini mengalami transformasi baik dari segi medium, strategi, maupun aktor yang terlibat.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) memungkinkan pengolahan data secara cepat, akurat, dan dalam skala besar. Kehadiran AI telah mempercepat arus informasi sekaligus menciptakan ruang komunikasi baru yang lebih dinamis dan kompleks.¹ Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, komunikasi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, menjaga stabilitas sosial, serta mempengaruhi arah kebijakan politik. Komunikasi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas dakwah dalam arti sempit, tetapi juga sebagai proses penyampaian nilai, norma, dan etika Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, komunikasi Islam memiliki posisi penting dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dengan berbagai institusi, termasuk organisasi politik.²

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, Islam telah menjadi bagian integral dalam dinamika politik nasional. Organisasi-organisasi Islam, baik yang berbasis massa maupun intelektual, seringkali terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, komunikasi Islam menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi, memobilisasi dukungan, serta menyampaikan aspirasi umat kepada para pemangku kebijakan.³ Namun demikian, memasuki era AI, dinamika komunikasi Islam mengalami perubahan signifikan. Teknologi AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk pola interaksi sosial melalui algoritma dan sistem otomatisasi. Media sosial yang didukung oleh AI, misalnya, mampu mengkurasi informasi sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan pengalaman komunikasi yang sangat personal. Di satu sisi, hal ini memberikan peluang bagi organisasi Islam untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif dan terarah. Namun di sisi lain, fenomena ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi informasi dan polarisasi sosial.⁴

Dalam ranah politik, penggunaan AI telah mengubah strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi politik. Kampanye politik kini tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga memanfaatkan *data analytics*, *micro-targeting*, dan

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell Publishers, 2010), 77.

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 55.

³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 45.

⁴ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), 210.

otomatisasi pesan. Dalam situasi ini, komunikasi Islam seringkali menjadi bagian dari narasi politik yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana nilai-nilai Islam diartikulasikan dalam komunikasi politik di era digital, serta sejauh mana AI mempengaruhi autentisitas dan integritas pesan keagamaan.⁵

Selain itu, muncul pula tantangan etis yang tidak dapat diabaikan. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten, serta penggunaan teknologi seperti *deepfake* menjadi ancaman serius dalam komunikasi berbasis AI. Dalam konteks komunikasi Islam, hal ini dapat merusak kepercayaan publik serta menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam dinamika komunikasi Islam dalam membangun relasi dengan organisasi politik di era AI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan yang terjadi, serta menawarkan perspektif kritis terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, nilai-nilai keagamaan, dan praktik demokrasi di Indonesia.

Konsep Komunikasi Islam

Komunikasi Islam merupakan suatu proses penyampaian pesan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran informasi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap aktivitas komunikasi dalam Islam harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang telah diajarkan dalam syariat, seperti kejujuran (*shidq*), amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (kecerdasan).⁷

Secara konseptual, komunikasi Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari komunikasi pada umumnya. Salah satu ciri utama adalah orientasinya yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Artinya, tujuan komunikasi dalam Islam tidak sekadar untuk mencapai kepentingan pragmatis, melainkan juga untuk memperoleh ridha Allah SWT. Hal ini menjadikan komunikasi Islam sarat dengan nilai-nilai etis dan tanggung jawab moral, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Tuhan.⁸

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan. Misalnya, perintah untuk berkata benar (*qaulan sadidan*), berkata dengan lemah lembut (*qaulan layyinan*), dan berkata yang baik (*qaulan ma'rufan*). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam harus

⁵ Philip N. Howard, *Lie Machines: How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, and Political Operatives* (New Haven: Yale University Press, 2020), 134.

⁶ Cass R. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (Princeton: Princeton University Press, 2017), 102.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 50.

⁸ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

mengedepankan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.⁹ Dengan demikian, komunikasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun harmoni sosial dan memperkuat ukhuwah (persaudaraan).

Selain itu, komunikasi Islam juga memiliki dimensi dakwah yang sangat kuat. Dakwah merupakan proses mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui berbagai bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun tindakan. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi instrumen utama dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan dakwah.¹⁰

Dalam perkembangan modern, konsep komunikasi Islam juga mengalami adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Munculnya media digital dan platform komunikasi berbasis internet telah membuka ruang baru bagi praktik komunikasi Islam. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis taklim, tetapi juga hadir dalam bentuk konten digital seperti video, podcast, dan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.¹¹

Namun demikian, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri. Kemudahan dalam menyebarkan informasi seringkali tidak diimbangi dengan verifikasi kebenaran, sehingga berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan. Dalam konteks ini, prinsip tabayyun (klarifikasi) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebenaran.¹²

Dengan demikian, konsep komunikasi Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem komunikasi yang tidak hanya menekankan aspek teknis penyampaian pesan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks relasi dengan organisasi politik, komunikasi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan umat dengan proses politik, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Organisasi Politik di Indonesia dan Relasinya dengan Islam

Relasi antara Islam dan organisasi politik di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks. Sejak masa pergerakan nasional, Islam telah menjadi salah satu kekuatan sosial yang berperan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Islam menjadi pelopor dalam mengintegrasikan identitas keagamaan dengan perjuangan politik melawan kolonialisme. Hal ini menunjukkan

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 421.

¹⁰ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 312.

¹¹ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa, 2012), 85.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 67.

bahwa sejak awal, Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai basis ideologis dalam aktivitas politik.¹³

Relasi organisasi politik di Indonesia dengan Islam dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu Islam politik dan Islam kultural. Islam politik merujuk pada upaya formalisasi ajaran Islam dalam sistem kenegaraan, terutama melalui partai politik berbasis Islam yang menjadikan nilai-nilai syariat sebagai inspirasi dalam penyusunan platform, kebijakan, dan agenda politik. Dalam konteks ini, Islam diposisikan sebagai ideologi yang dapat diinstitusionalisasikan dalam struktur politik formal.¹⁴ Di sisi lain, Islam kultural lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial tanpa harus diwujudkan secara formal dalam bentuk negara atau hukum. Pendekatan ini sering terlihat pada partai-partai nasionalis yang tidak secara eksplisit berasaskan Islam, tetapi tetap mengakomodasi aspirasi umat Muslim melalui simbol, retorika, dan kebijakan yang bernuansa religious.

Pasca kemerdekaan, relasi antara Islam dan organisasi politik terus berkembang dalam berbagai bentuk. Pada masa demokrasi parlementer, partai-partai politik berbasis Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama memainkan peran signifikan dalam proses politik nasional. Namun, dinamika politik yang berubah, terutama pada masa Orde Baru, membatasi ruang gerak politik Islam melalui kebijakan depolitisasi dan penyederhanaan partai.¹⁵ Meskipun demikian, nilai-nilai Islam tetap hidup dalam masyarakat dan terus mempengaruhi orientasi politik umat.

Memasuki era reformasi, terjadi kebangkitan kembali partisipasi politik berbasis Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai partai politik yang mengusung identitas Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan arah kebijakan politik, meskipun secara formal tidak terlibat langsung dalam politik praktis.¹⁶

Relasi antara organisasi politik dan Islam di Indonesia dapat dipahami dalam beberapa pola. Pertama, pola integratif, di mana nilai-nilai Islam menjadi dasar ideologi organisasi politik. Kedua, pola simbiotik, di mana organisasi politik dan kelompok Islam saling membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing. Ketiga, pola instrumental, di mana agama digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik.¹⁷ Ketiga pola ini seringkali muncul secara bersamaan dalam praktik politik di Indonesia, tergantung pada konteks sosial dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

¹³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 98.

¹⁴ LL Saefudin Zuhri “Dinamika Islam Politik dan Islam Kultural Di Indonesia”. *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 1 (September 29, 2020): 51–66.

¹⁵ Effendy, *Islam dan Negara*, 112.

¹⁶ Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 56.

¹⁷ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), 73.

Dalam praktiknya, komunikasi Islam memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga relasi tersebut. Melalui dakwah, ceramah, media massa, dan kini media digital, pesan-pesan keagamaan seringkali dikaitkan dengan isu-isu politik. Hal ini dapat memperkuat kesadaran politik umat, tetapi juga berpotensi menimbulkan politisasi agama jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ekspresi keagamaan dan kepentingan politik agar tidak menimbulkan konflik sosial.¹⁸

Di era kontemporer, terutama dengan hadirnya teknologi digital dan AI, relasi ini menjadi semakin kompleks. Organisasi politik kini memanfaatkan simbol dan narasi keagamaan dalam strategi komunikasi mereka, sementara kelompok Islam menggunakan teknologi untuk memperluas pengaruhnya dalam ruang publik. Interaksi ini menciptakan dinamika baru yang menuntut adanya pemahaman yang lebih kritis terhadap peran agama dalam politik.¹⁹

Dengan demikian, relasi antara organisasi politik dan Islam di Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual. Peran Islam tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai landasan moral dalam membangun praktik politik yang adil dan inklusif. Relasi antara organisasi politik dan Islam di Indonesia merupakan fenomena yang dinamis dan terus berkembang. Islam memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai dan legitimasi, sementara organisasi politik menjadi sarana implementasi aspirasi umat dalam kebijakan publik. Tantangan ke depan adalah menjaga agar relasi ini tetap berada dalam koridor demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.

Transformasi Komunikasi pada Era AI

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berkomunikasi, baik dalam konteks interpersonal, sosial, maupun politik. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tetapi juga sebagai sistem yang mampu mengolah, menganalisis, dan bahkan memproduksi pesan komunikasi secara otomatis. Transformasi ini menandai pergeseran dari komunikasi konvensional menuju komunikasi digital yang berbasis data dan algoritma.²⁰ Hal ini menjadikan komunikasi lebih personal, cepat, dan berbasis data.

Dalam konteks media digital, AI berperan penting dalam menyaring dan mengurangi informasi melalui algoritma yang menentukan konten apa yang muncul di hadapan pengguna. Akibatnya, komunikasi menjadi sangat tersegmentasi dan terarah, tetapi juga berpotensi menciptakan “filter bubble” yang membatasi keberagaman informasi.²¹ Selain itu, penggunaan AI dalam produksi konten, seperti penulisan otomatis dan pembuatan video sintetis, mengubah peran manusia dari produsen utama menjadi kurator dan pengawas informasi.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), 145.

¹⁹ Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 201.

²⁰ Manuel Castells, *Communication Power* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 54.

²¹ D. Lazer et al., “The Science of Fake News,” *Science* 359, no. 6380 (2018): 1094–1096.

Di sisi lain, transformasi ini menghadirkan tantangan etis, seperti penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, serta isu privasi data. Teknologi seperti deepfake dapat mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa digital.²² Oleh karena itu, diperlukan regulasi, literasi digital, dan etika komunikasi yang kuat agar pemanfaatan AI tetap mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu bentuk transformasi yang paling nyata adalah munculnya media sosial berbasis algoritma yang mampu mengatur arus informasi sesuai dengan preferensi pengguna. Platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menggunakan teknologi AI untuk mengkurasi konten yang ditampilkan kepada pengguna, sehingga menciptakan pengalaman komunikasi yang bersifat personal dan tersegmentasi.²³ Dalam konteks ini, komunikasi tidak lagi bersifat linear, tetapi menjadi interaktif dan dinamis, di mana pengguna sekaligus berperan sebagai produsen dan konsumen informasi.

Selain itu, AI juga memungkinkan adanya otomatisasi dalam produksi dan distribusi pesan. Teknologi seperti *chatbot*, *natural language processing* (NLP), dan *machine learning* memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan efisien tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Dalam bidang komunikasi keagamaan, misalnya, AI dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar ajaran Islam, menyebarkan konten dakwah, serta menganalisis respons audiens terhadap pesan yang disampaikan.²⁴ Hal ini membuka peluang besar bagi efektivitas komunikasi, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas dan validitas sumber informasi.

Transformasi komunikasi pada era AI juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam komunikasi politik, organisasi politik memanfaatkan big data dan analisis prediktif untuk memahami perilaku pemilih, menentukan strategi kampanye, serta menyusun pesan yang lebih tepat sasaran. Teknik seperti *micro-targeting* memungkinkan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan karakteristik individu atau kelompok tertentu.²⁵ Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih strategis, namun juga berpotensi manipulatif jika tidak diatur dengan baik.

Di sisi lain, perkembangan AI juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk disinformasi dan manipulasi konten. Teknologi seperti *deepfake* memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang tampak realistis, sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Selain itu, keberadaan bot dan akun palsu dalam media sosial dapat memperkuat penyebaran propaganda dan memperkeruh diskursus publik.²⁶ Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap informasi menjadi semakin rentan, sehingga diperlukan literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat.

²² T. Chesney dan D. K. Citron, "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security," *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1758–1760.

²³ Dijck, *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 32.

²⁴ Nick Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 112.

²⁵ Howard, *Lie Machines: How to Save Democracy*, 89.

²⁶ Sunstein, *#Republic: Divided Democracy*, 140.

Dengan demikian, era AI tidak hanya mengubah teknologi komunikasi, tetapi juga struktur sosial dan budaya komunikasi masyarakat secara luas.²⁷ Transformasi ini juga mempengaruhi struktur kekuasaan dalam komunikasi. Jika sebelumnya media massa tradisional memiliki kontrol yang besar terhadap arus informasi, kini kekuasaan tersebut tersebar ke berbagai aktor, termasuk individu dan komunitas digital. AI mempercepat proses desentralisasi ini dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi informasi.²⁸ Namun, pada saat yang sama, perusahaan teknologi yang mengembangkan AI juga memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan algoritma dan data pengguna.

Transformasi komunikasi pada era AI merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, AI memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan efektivitas komunikasi. Namun di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan serius terkait etika, kepercayaan, dan keadilan dalam distribusi informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI, terutama dalam konteks komunikasi Islam dan politik, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena dinamika komunikasi Islam dalam membangun relasi dengan organisasi politik pada era Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, serta interpretasi terhadap realitas sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara nilai-nilai keagamaan, praktik komunikasi, dan perkembangan teknologi digital.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai perspektif teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komunikasi Islam, politik, dan teknologi AI.³⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan pustaka primer dan sekunder, seperti buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi. Selain itu, sumber digital seperti artikel ilmiah daring dan publikasi lembaga riset juga digunakan untuk memperkaya analisis.³¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi terhadap literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis,

²⁷ S. K. Dwivedi et al., "Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research," *International Journal of Information Management* 57 (2021): 3–5.

²⁸ Zuboff, *The Age of Surveillance*, 312.

²⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 4.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama serta menginterpretasikan hubungan antarvariabel yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menyajikan data secara sistematis, tetapi juga memberikan pemaknaan kritis terhadap fenomena yang dikaji.³²

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif untuk meminimalkan bias serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.³³ Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika komunikasi Islam dalam konteks relasi politik di era AI, serta menghasilkan analisis yang relevan dengan perkembangan sosial kontemporer di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Relasi Komunikasi Islam dan Organisasi Politik

1. Digitalisasi Dakwah Politik

Perkembangan teknologi digital dan kecanggihan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong munculnya fenomena digitalisasi dakwah politik. Digitalisasi dakwah politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan keagamaan yang dikaitkan dengan isu politik melalui media digital, termasuk media sosial, platform video, blog, dan aplikasi pesan instan. Transformasi ini memudahkan penyebaran pesan secara cepat, luas, dan personal, sekaligus memungkinkan organisasi politik dan kelompok keagamaan untuk membangun narasi yang terstruktur dan terukur.³⁴

Digitalisasi dakwah politik merujuk pada transformasi cara penyampaian dan penyebaran pesan keagamaan yang berkaitan dengan nilai-nilai politik melalui platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi komunikasi online. Era digital telah mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis, termasuk bagaimana pesan dakwah disampaikan dan diakses oleh publik. Di masa lalu, dakwah politik lebih banyak berlangsung melalui ceramah tatap muka, majelis, atau media tradisional; kini konten dakwah politik dapat diakses secara instan dan masif melalui internet.³⁵

Platform digital memungkinkan aktor keagamaan menggabungkan narasi keagamaan dengan isu-isu politik secara lebih strategis untuk membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan. Misalnya, penggunaan simbol keagamaan dalam pesan politik yang disesuaikan dengan karakter unik masing-masing platform seperti Instagram atau TikTok dapat menciptakan resonansi emosional yang kuat dengan audiens tertentu. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan etis karena pemanfaatan nilai

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

³³ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), 291.

³⁴ Azyumardi Azra, *Islam Kontemporer: Tradisi dan Modernisasi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2004), 112.

³⁵ Anang Setiawan et al., "Digitalization of Islamic Politics in Indonesia: A Critical Study of Religion-Based Political Parties," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 11, no. 1 (2026): 242–244.

keagamaan untuk tujuan politik berpotensi mempersempit ruang deliberasi publik dan meningkatkan polarisasi.³⁶

Digitalisasi dakwah politik juga memungkinkan personalisasi pesan, di mana konten dikurasi sesuai dengan karakteristik audiens. Analisis big data dan machine learning memungkinkan pihak penyebar dakwah untuk memahami minat, preferensi, dan perilaku pengguna digital. Hasilnya, pesan dakwah dapat disesuaikan agar lebih persuasif dan mudah diterima, terutama di kalangan generasi muda yang sangat bergantung pada media digital.³⁷ Pendekatan ini memadukan strategi komunikasi Islam dengan strategi politik modern, sehingga tercipta interaksi yang dinamis antara nilai keagamaan dan kepentingan politik.

Namun, digitalisasi dakwah politik tidak lepas dari tantangan serius. Salah satunya adalah potensi polarisasi sosial dan manipulasi informasi. Pesan dakwah yang dikombinasikan dengan kampanye politik dapat memunculkan sentimen sektarian atau menguatkan identitas kelompok tertentu secara berlebihan. Selain itu, teknologi AI memungkinkan penyebaran informasi yang belum diverifikasi, sehingga dapat menimbulkan disinformasi atau hoaks yang merusak kepercayaan publik.³⁸

Selain tantangan, digitalisasi dakwah politik juga menghadirkan peluang signifikan. Organisasi Islam yang adaptif terhadap teknologi dapat memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskursus politik, dan membangun relasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan politik. Dengan pendekatan yang etis dan transparan, digitalisasi dakwah politik dapat menjadi instrumen untuk membangun kesadaran politik berbasis nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan integritas pesan keagamaan.³⁹

Dakwah digital menghadirkan peluang besar dalam penyebaran pesan keagamaan, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan etika komunikasi yang kompleks. Kemudahan akses media sosial memungkinkan pesan dakwah menjangkau audiens luas secara cepat, namun juga berisiko menimbulkan misinformasi, ujaran kebencian, dan distorsi nilai agama. Oleh karena itu, pendakwah dituntut untuk mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, serta sensitivitas terhadap dampak sosial dari konten yang disampaikan. Etika komunikasi menjadi kunci agar dakwah tetap konstruktif, inklusif, dan mampu menjaga harmoni dalam masyarakat digital yang plural.⁴⁰ Selain itu, digitalisasi dakwah politik membuka ruang kolaborasi antara organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan,

³⁶ Fatimah dan Farid Pribadi, "The Digital Da'wah (Preachers) and Hegemony in Digital Age: A Study of Muslim Generations' Political Preferences by Social Media," *Journal of Southern Sociological Studies* 1, no. 2 (2025): 208–210.

³⁷ Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (Cambridge: Polity Press, 2012), 87.

³⁸ Zuboff, *The Age of Surveillance*, 345.

³⁹ Asep Syamsul M. Romli, *Media Dakwah Digital: Strategi Komunikasi Islam di Era Informasi* (Bandung: Nuansa, 2018), 92.

⁴⁰ Marzuki, N. Fatima, and I. Sariningsih, "Da'wah Ethics in the Digital Era in Media Transformation and Moral Governance," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 10, no. 2 (2025): 67–78, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v10i2.6923>

media, maupun organisasi politik. Misalnya, seminar online, forum diskusi, atau podcast keagamaan-politik menjadi sarana baru untuk membangun narasi yang kritis dan konstruktif. Proses ini memperlihatkan bahwa dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi mampu menembus batas geografis dan demografis, menjadikannya lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.⁴¹

Digitalisasi dakwah politik merupakan fenomena yang kompleks, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan strategi komunikasi modern berbasis teknologi digital dan AI. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penyampaian pesan, integritas dakwah, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan yang etis dan kritis menjadi kunci agar digitalisasi dakwah politik mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan demokrasi di Indonesia.

2. Otoritas Keagamaan di Era Digital

Era digital dan kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan terhadap konsep dan praktik otoritas keagamaan. Secara tradisional, otoritas keagamaan dalam Islam di Indonesia banyak dipegang oleh ulama, cendekiawan, dan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Otoritas ini bersumber dari pengetahuan keagamaan, pengalaman dakwah, serta legitimasi sosial yang telah terbangun melalui interaksi langsung dengan komunitas.⁴²

Fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital terjadi karena hilangnya dominasi lembaga dan ulama tradisional sebagai satu-satunya rujukan. Internet membuka akses luas terhadap berbagai sumber keagamaan, sehingga individu dapat memilih, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran sesuai preferensinya. Fenomena ini melahirkan konsep *do-it-yourself religion*, di mana otoritas bersifat personal dan tidak lagi terpusat. Akibatnya, muncul beragam interpretasi yang sering kali saling bersaing, sekaligus memperlemah kontrol terhadap validitas keilmuan dan otoritas keagamaan yang mapan dalam masyarakat.⁴³

Digitalisasi komunikasi telah mendefinisikan cara masyarakat mengakses informasi keagamaan. Kini, individu dapat memperoleh pengetahuan Islam dari berbagai sumber daring, termasuk media sosial, kanal YouTube, podcast, blog, dan aplikasi pesan instan. Fenomena ini menimbulkan perubahan mendasar dalam struktur otoritas keagamaan, di mana legitimasi tradisional yang bersifat hierarkis mulai ditantang oleh figur-figur digital yang populer dan berpengaruh.⁴⁴ Contoh nyata adalah para influencer dakwah yang mampu menarik jutaan pengikut melalui konten singkat, ceramah video, atau pesan

⁴¹ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 402.

⁴² Azra, *Islam Kontemporer*, 123.

⁴³ Lukman Hakim and Zainal Mukhlis, "Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2023): 119–132, <https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>

⁴⁴ Robert W. McChesney, *Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet Against Democracy* (New York: The New Press, 2013), 67.

motivasi berbasis nilai-nilai Islam, meskipun latar belakang formal keagamaan mereka bervariasi.⁴⁵

Fenomena otoritas keagamaan di era digital ditandai oleh pergeseran dari legitimasi tradisional berbasis lembaga, sanad keilmuan, dan otoritas ulama menuju bentuk baru yang dipengaruhi teknologi dan media sosial. Dalam ruang digital, otoritas tidak lagi ditentukan semata oleh kompetensi keilmuan, melainkan oleh visibilitas, popularitas, dan kemampuan membangun audiens. Munculnya “pendakwah digital” dan *micro-celebrity* keagamaan menunjukkan bahwa algoritma, estetika komunikasi, dan interaksi publik berperan besar dalam membentuk legitimasi. Akibatnya, otoritas menjadi lebih cair, kompetitif, dan terfragmentasi, sekaligus membuka peluang partisipasi luas namun juga risiko penurunan kualitas otoritas keilmuan.⁴⁶

Kehadiran AI dan algoritma dalam distribusi konten semakin memperkuat pengaruh figur digital ini. Konten yang mendapatkan engagement tinggi lebih sering muncul di feed pengguna, sehingga popularitas digital menjadi salah satu indikator otoritas di ranah online.⁴⁷ Hal ini menimbulkan dinamika baru, di mana otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas akademik atau pengalaman dakwah, tetapi juga oleh kemampuan digital dalam menyampaikan pesan secara persuasif dan viral.

Perubahan ini membawa tantangan serius. Pertama, munculnya fragmentasi otoritas keagamaan, di mana masyarakat bisa memilih narasumber sesuai preferensi atau kesesuaian ideologis, sehingga potensi konflik interpretasi meningkat. Kedua, risiko disinformasi dan penyalahgunaan pesan keagamaan menjadi lebih tinggi, karena audiens sering kali menganggap konten populer setara dengan konten valid.⁴⁸ Misalnya, pesan dakwah politik yang disampaikan oleh figur digital tertentu dapat memengaruhi opini dan pilihan politik pengikutnya, meskipun kontennya belum tentu akurat atau sejalan dengan ajaran Islam mainstream.

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang untuk memperkuat otoritas keagamaan secara positif. Organisasi keagamaan dapat memanfaatkan AI untuk memproduksi konten dakwah yang kredibel, menyebarkan literasi keagamaan, dan melakukan interaksi yang responsif dengan komunitas. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pesan keagamaan disampaikan secara lebih luas, efektif, dan inklusif, termasuk kepada generasi muda yang lebih familiar dengan media digital.⁴⁹

Dengan demikian, era digital menggeser paradigma otoritas keagamaan dari legitimasi formal ke legitimasi digital, menuntut penyesuaian dari semua pihak agar informasi keagamaan tetap akurat, bertanggung jawab, dan mampu membimbing

⁴⁵ Agus Mustofa, *Dakwah Digital: Strategi Komunikasi Islam di Era Teknologi* (Bandung: Nuansa, 2020), 58.

⁴⁶ Rahmat Hidayatullah, “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2024): 1–16, https://journal.uinjkt.ac.id/una/article/view/42831?utm_source=chatgpt.com

⁴⁷ Castells, *Communication Power*, 112.

⁴⁸ Pariser, *The Filter Bubble*, 101.

⁴⁹ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 418.

masyarakat secara sehat. Otoritas keagamaan di era digital menjadi lebih dinamis dan multidimensional. Legitimasi keagamaan kini tidak hanya diukur melalui hierarki tradisional, tetapi juga melalui pengaruh digital, kemampuan komunikasi daring, dan interaksi dengan audiens. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara otoritas tradisional dan digital, serta memastikan bahwa pengaruh online tetap berlandaskan prinsip-prinsip keagamaan, etika, dan kemaslahatan umat.

3. Polarisasi dan *Echo Chamber*

Era digital yang didukung oleh *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Salah satu dampak signifikan dari transformasi ini adalah munculnya fenomena polarisasi dan *echo chamber* dalam ranah komunikasi, termasuk komunikasi Islam dan politik di Indonesia. Polarisasi merujuk pada perbedaan pendapat yang semakin tajam antara kelompok-kelompok sosial, sedangkan *echo chamber* mengacu pada kondisi di mana individu hanya terpapar pada informasi atau opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga memperkuat pandangan yang sudah ada.⁵⁰

Media sosial, algoritma AI, dan platform digital memainkan peran kunci dalam membentuk *echo chamber*. Algoritma yang dirancang untuk meningkatkan *engagement* cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Hal ini menyebabkan pengguna lebih sering melihat informasi yang sejalan dengan pandangan mereka, sementara sudut pandang berbeda jarang muncul.⁵¹ Dalam konteks komunikasi Islam dan politik, fenomena ini berpotensi memperkuat stereotip, memunculkan ketegangan antar kelompok, dan menimbulkan fragmentasi sosial yang tajam.

Lebih jauh, kombinasi polarisasi dan *echo chamber* berpotensi merusak kualitas demokrasi. Diskursus publik menjadi terbatas dan kompromi politik sulit dicapai. Oleh karena itu, literasi digital dan kesadaran kritis menjadi penting agar individu mampu mengevaluasi informasi secara objektif. Selain itu, platform digital harus merancang algoritma yang mendorong keberagaman informasi, bukan hanya keterlibatan pengguna.⁵² Memahami polarisasi dan *echo chamber* penting untuk menciptakan ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan mampu mendukung dialog yang konstruktif antarwarga.

Polarisasi yang terjadi akibat *echo chamber* dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya polarisasi ideologis, sektarian, atau politik. Di Indonesia, pesan-pesan dakwah yang dikaitkan dengan agenda politik tertentu kadang diperkuat melalui media digital, sehingga menimbulkan pembentukan opini yang homogen di kalangan pengikut tertentu.⁵³ Akibatnya, dialog antar kelompok menjadi terbatas, dan ruang untuk

⁵⁰ Sunstein, *#Republic: Divided Democracy*, 45.

⁵¹ Dijck, *The Culture of Connectivity*, 89.

⁵² Jasmine Khairina H. W. et al., "Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2022): 123–126.

⁵³ Howard, *Lie Machines: How to Save Democracy*, 142.

kompromi atau pemahaman lintas kelompok semakin sempit. Polarisasi ini tidak hanya memengaruhi opini politik, tetapi juga membentuk identitas sosial yang kaku dan memicu konflik horizontal.

Selain itu, AI dan big data memperkuat kemampuan organisasi politik atau kelompok keagamaan untuk menargetkan pesan mereka secara mikro (*micro-targeting*). Strategi ini, jika tidak dikelola secara etis, dapat memanfaatkan echo chamber untuk memobilisasi dukungan politik berdasarkan narasi yang terfragmentasi dan selektif.⁵⁴ Misalnya, konten dakwah digital yang dikombinasikan dengan kampanye politik tertentu dapat menguatkan persepsi kelompok tertentu terhadap isu sosial dan agama, sekaligus memperkuat jarak sosial dengan kelompok lain.

Dampak polarisasi dan echo chamber bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional. Pengguna cenderung mengalami konfirmasi bias (*confirmation bias*), di mana mereka lebih mempercayai informasi yang mendukung pandangan mereka dan menolak informasi yang bertentangan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, intoleransi, dan resistensi terhadap dialog lintas kelompok.⁵⁵ Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi berbasis AI memerlukan kesadaran etis dan literasi digital yang memadai agar pesan yang disampaikan tidak merusak kohesi sosial.

Di sisi lain, tantangan ini membuka peluang untuk inovasi dalam strategi komunikasi Islam dan politik. Misalnya, pendekatan yang menekankan verifikasi informasi (tabayyun), inklusivitas pesan, dan dialog lintas kelompok dapat mengurangi efek echo chamber dan polarisasi.⁵⁶ Pemanfaatan teknologi AI secara kritis, bukan hanya untuk menargetkan audiens yang sudah setuju, tetapi juga untuk membangun interaksi yang konstruktif, menjadi langkah penting bagi organisasi politik dan dakwah Islam di era digital.

Dengan demikian, fenomena polarisasi dan *echo chamber* merupakan tantangan nyata bagi komunikasi Islam dan politik di era AI. Dampak jangka panjangnya bisa memengaruhi stabilitas sosial, kualitas demokrasi, dan efektivitas dakwah. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip etika, literasi digital, dan strategi komunikasi inklusif menjadi sangat penting untuk menghadapi era digital yang penuh kompleksitas ini.

4. Etika Komunikasi dan Disinformasi

Perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) telah membuka peluang luas bagi penyebaran informasi, termasuk dalam ranah komunikasi Islam dan politik. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko tinggi terkait disinformasi dan penyebaran pesan yang tidak etis. Disinformasi merujuk pada informasi yang sengaja dibuat atau disebar untuk menyesatkan audiens, sementara etika komunikasi

⁵⁴ Zuboff, *The Age of Surveillance*, 318.

⁵⁵ Eli Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* (New York: Penguin, 2011), 78.

⁵⁶ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 414.

menekankan tanggung jawab moral, kejujuran, dan integritas dalam menyampaikan pesan.⁵⁷

Etika komunikasi merupakan seperangkat norma yang mengatur bagaimana individu menyampaikan dan menerima informasi secara bertanggung jawab, jujur, serta menghormati pihak lain. Dalam era digital, etika komunikasi menjadi semakin penting karena arus informasi yang cepat dan masif membuka peluang terjadinya disinformasi. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan secara sengaja, yang dapat memengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan sosial.⁵⁸

Dalam konteks komunikasi Islam, etika komunikasi memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan prinsip kejujuran (*shidq*), amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (kecerdasan). Pesan yang disampaikan harus mendorong kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat.⁵⁹ Namun, dengan munculnya media digital dan algoritma AI, penyebaran pesan keagamaan dan politik dapat dengan mudah dimanipulasi, sehingga menimbulkan potensi disinformasi. Misalnya, konten dakwah yang dikombinasikan dengan narasi politik tertentu dapat menyebar luas tanpa verifikasi kebenaran, sehingga mengaburkan batas antara fakta dan opini.⁶⁰

Hal ini menyebabkan batas antara informasi benar dan salah menjadi kabur. Dalam konteks ini, etika komunikasi menuntut adanya prinsip kejujuran, akurasi, serta tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Tanpa prinsip tersebut, ruang digital rentan dipenuhi oleh hoaks, manipulasi, dan propaganda.⁶¹ Disinformasi di era digital sering diperkuat oleh fenomena *echo chamber*, di mana audiens hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka.⁶² AI dan algoritma platform digital menyesuaikan distribusi konten agar lebih menarik bagi pengguna, tanpa mempertimbangkan akurasi atau dampak sosial. Akibatnya, pesan yang tidak etis atau menyesatkan dapat dengan cepat menjadi viral, memperkuat polarisasi, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi keagamaan maupun politik.

Dalam menghadapi disinformasi, etika komunikasi memegang peran strategis. Pertama, prinsip verifikasi (*tabayyun*) menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan benar, akurat, dan sesuai dengan ajaran Islam.⁶³ Kedua, komunikasi harus bersifat inklusif dan tidak memecah belah masyarakat, terutama dalam konteks isu keagamaan-politik yang sensitif. Ketiga, integritas pesan harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis atau politis semata.⁶⁴

⁵⁷ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 423.

⁵⁸ Bustami Bustami et al., "Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth," *Jurnal Paradigma* 5, no. 1 (2024): 15–17.

⁵⁹ Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 62.

⁶⁰ Castells, *Communication Power*, 117.

⁶¹ Aditya Eka Putra et al., "Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru," *Jurnal Nomosleca* 9, no. 2 (2023): 88–90.

⁶² Pariser, *The Filter Bubble*, 92.

⁶³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 74.

⁶⁴ Howard, *Lie Machines: How to Save Democracy*, 198.

Penerapan etika komunikasi dalam era AI juga mencakup literasi digital, baik bagi penyampai pesan maupun audiens. Literasi digital membantu individu memahami mekanisme algoritma, mengenali konten palsu, dan mengambil keputusan kritis dalam menanggapi informasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga agen aktif yang dapat memfilter dan menilai kebenaran pesan.⁶⁵

Selain itu, organisasi keagamaan dan politik harus mengadopsi prinsip transparansi dalam komunikasi digital. Konten yang disebarakan harus jelas sumbernya, tujuan komunikasinya, dan relevansi dengan nilai-nilai Islam. Praktik ini tidak hanya mengurangi risiko disinformasi, tetapi juga memperkuat legitimasi otoritas keagamaan dan politik di era digital.⁶⁶

Dengan demikian, etika komunikasi menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital. Kombinasi prinsip-prinsip moral Islam, literasi digital, dan transparansi organisasi dapat menciptakan komunikasi yang bertanggung jawab, kredibel, dan konstruktif. Hal ini menjadi prasyarat agar dakwah Islam dan komunikasi politik di Indonesia tetap efektif, etis, dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.

5. Implikasi terhadap Demokrasi di Indonesia

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan digitalisasi komunikasi tidak hanya memengaruhi dakwah Islam dan organisasi politik, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi modern sangat bergantung pada kualitas informasi, partisipasi publik, dan keterbukaan dialog antarwarga. Namun, kehadiran AI dan media digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi proses demokrasi di negara yang berpenduduk majemuk ini.⁶⁷

Salah satu implikasi positif adalah peningkatan partisipasi publik. AI memungkinkan organisasi politik dan keagamaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam menyerap informasi, berdiskusi, dan memberikan masukan terhadap isu-isu politik maupun sosial.⁶⁸ Misalnya, aplikasi dan media sosial berbasis AI memungkinkan masyarakat mengikuti debat publik, polling, dan forum diskusi daring yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih inklusif karena suara masyarakat lebih mudah terdengar.

Selain itu, AI dapat meningkatkan efisiensi proses kampanye dan komunikasi politik. Organisasi politik dapat menggunakan analisis big data untuk memahami preferensi pemilih, mengukur respons terhadap kebijakan, dan menyesuaikan strategi komunikasi secara real time.⁶⁹ Hal ini memungkinkan proses demokrasi menjadi lebih

⁶⁵ Dijck, *The Culture of Connectivity*, 145.

⁶⁶ Romli, *Media Dakwah Digital*, 105.

⁶⁷ Howard, *Lie Machines: How to Save Democracy*, 215.

⁶⁸ Castells, *Networks of Outrage and Hope*, 98.

⁶⁹ Zuboff, *The Age of Surveillance*, 327.

responsif terhadap aspirasi publik, selama pemanfaatannya dilakukan secara etis dan transparan.

Namun, ada implikasi negatif yang perlu diwaspadai. AI dan media digital meningkatkan risiko disinformasi, manipulasi opini, dan polarisasi politik.⁷⁰ Misalnya, konten politik atau dakwah yang dipersonalisasi secara algoritmis dapat menciptakan echo chamber, di mana individu hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Fenomena ini dapat memicu konflik identitas, mengurangi toleransi, dan melemahkan ruang dialog, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi.⁷¹

Tantangan lain adalah penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan politik yang pragmatis, seperti propaganda digital atau kampanye hitam.⁷² Kemampuan AI dalam micro-targeting dan analisis prediktif dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi perilaku pemilih tanpa transparansi. Jika tidak diatur dengan baik, praktik semacam ini berpotensi merusak integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Di sisi keagamaan, interaksi antara dakwah Islam dan politik melalui media digital juga memengaruhi persepsi publik terhadap partisipasi politik. Organisasi keagamaan yang menggunakan AI untuk menyebarkan pesan dakwah yang dikaitkan dengan agenda politik tertentu dapat membentuk opini masyarakat secara signifikan.⁷³ Sementara hal ini meningkatkan engagement politik berbasis nilai, risiko polarisasi sektarian juga meningkat, yang pada gilirannya dapat menantang prinsip demokrasi yang inklusif.

Oleh karena itu, integrasi AI dalam komunikasi politik dan dakwah harus disertai regulasi, literasi digital, dan penerapan etika komunikasi. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menilai informasi secara kritis, transparansi konten digital, dan pengawasan penggunaan AI menjadi langkah penting agar demokrasi tetap sehat dan partisipatif.⁷⁴ Dengan pendekatan ini, AI bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen yang dapat memperkuat demokrasi berbasis nilai, termasuk nilai keadilan, inklusivitas, dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, AI membawa implikasi ganda bagi demokrasi di Indonesia: meningkatkan partisipasi dan responsivitas publik sekaligus menghadirkan risiko polarisasi, disinformasi, dan manipulasi opini. Keberhasilan demokrasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat, organisasi keagamaan, dan aktor politik dalam memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dinamika komunikasi Islam dalam membangun relasi dengan organisasi politik di Indonesia pada era *Artificial Intelligence* (AI) menunjukkan perubahan yang kompleks dan multidimensional. AI dan teknologi digital memberikan peluang signifikan, seperti

⁷⁰ Pariser, *The Filter Bubble*, 88.

⁷¹ Sunstein, *#Republic: Divided Democracy*, 52.

⁷² Nick Couldry and Ulises A. Mejias, *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism* (Stanford: Stanford University Press, 2019), 141.

⁷³ Azra, *Islam Kontemporer*, 136.

⁷⁴ Effendy, *Ilmu Komunikasi*, 429.

personalisasi pesan, perluasan jangkauan komunikasi, peningkatan partisipasi publik, dan inovasi metode dakwah yang lebih interaktif. Teknologi ini memungkinkan organisasi keagamaan dan politik untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan relevan dengan konteks sosial-politik modern.

Namun, di sisi lain, era AI juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah besar. Polarisasi, echo chamber, risiko disinformasi, penyalahgunaan algoritma untuk manipulasi opini, serta perubahan struktur otoritas keagamaan menjadi isu kritis yang perlu dikelola dengan hati-hati. Tantangan ini menuntut penerapan etika komunikasi, literasi digital, regulasi yang jelas, dan kesadaran kritis dari masyarakat agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan konstruktif.

Implikasi dari dinamika ini terhadap demokrasi di Indonesia bersifat ganda. Sementara AI memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dan responsif, teknologi ini juga berpotensi memicu polarisasi politik dan merusak integritas proses demokrasi apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, kesadaran etis, transparansi, dan literasi digital menjadi kunci agar demokrasi tetap inklusif, partisipatif, dan berlandaskan prinsip kemaslahatan masyarakat.

Secara keseluruhan, komunikasi Islam di era AI tidak hanya menghadirkan peluang strategis bagi organisasi politik dan dakwah, tetapi juga menuntut manajemen risiko yang cermat. Pemanfaatan AI yang bijaksana, berlandaskan prinsip etika, moral, dan nilai-nilai Islam, akan memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif, relasi sosial-politik yang harmonis, dan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Azra, Azyumardi. *Islam Kontemporer: Tradisi dan Modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan, 2000.
- Bostrom, Nick. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Bustami, et al. "Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth". *Jurnal Paradigma* 5, no. 1 (2024): 38-53. <https://journal.ugm.ac.id/paradigma/article/view/91604>
- Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Castells, Manuel. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishers, 2010.
- Chesney, Robert, and Danielle K. Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security". *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1758–1760. https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/640/

- Couldry, Nick, and Ulises A. Mejias. *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford: Stanford University Press, 2019.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Dijk, José van. *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Fatimah and Farid Pribadi. "The Digital Da'wah (Preachers) and Hegemony in Digital Age: A Study of Muslim Generations' Political Preferences by Social Media". *Journal of Southern Sociological Studies* 1, no. 2 (2025): 208-210. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsss/article/view/40520>
- Fealy, Greg, and Sally White. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Hakim, Lukman, and Zainal Mukhlis. "Otoritas Agama Di Ruang Siber: Fragmentasi Dan Kontestasi". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (October 1, 2023): 119–132. <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIK/article/view/1574>.
- Hidayatullah, Rahmat. "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru Di Ruang Digital". *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (December 17, 2025): 1–16. <https://journal.uinjkt.ac.id/una/article/view/42831>.
- Howard, Philip N. *Lie Machines: How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, and Political Operatives*. New Haven: Yale University Press, 2020.
- Khairina H. W., Jasmine, et al. "Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2022): 123–126. <https://www.semanticscholar.org/paper/Fenomena-Echo-Chamber-di-Media-Sosial-dan-Dampaknya-JasmineKhairinaH.-Rizkyawan/eb6bef4cf07daf1961460a7303041cbc928626a6#:~:text=Fenomena%20Echo%20Chamber%20di%20Media%20Sosial%20dan,W.%2C%20Kresna%20Faza%20Rizkyawan%2C%20+2%20authors.%20Y>.
- Lazer, David M.J. et al. "The Science of Fake News". *Science* 359, no. 6380 (2018): 1094–1096. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao2998>
- Marzuki, N. Fatima, and I. Sariningsih. "Da'wah Ethics in the Digital Era in Media Transformation and Moral Governance". *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 10, no. 2 (2025): 67–78, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v10i2.6923>

- McChesney, Robert W. *Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet Against Democracy*. New York: The New Press, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mustofa, Agus. *Dakwah Digital: Strategi Komunikasi Islam di Era Teknologi*. Bandung: Nuansa, 2020.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. (New York: Penguin, 2011).
- Putra, Aditya Eka, et al. “Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru”. *Jurnal Nomosleca* 9, no. 2 (2023): 216-232, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/9815>
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Romli, Asep Syamsul M. *Media Dakwah Digital: Strategi Komunikasi Islam di Era Informasi*. Bandung: Nuansa, 2018.
- Setiawan, Anang, et al. “Digitalization of Islamic Politics in Indonesia: A Critical Study of Religion-Based Political Parties”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 11, no. 1 (2026): 242–260. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/6131>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019).
- Zuhri, LL Saefudin. “Dinamika Islam Politik dan Islam Kultural Di Indonesia”. *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 1 (September 29, 2020): 51–66. <https://journal.uinjkt.ac.id/indo-islamika/article/view/17541>.